

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Kursus Kewirausahaan Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan pembangunan. Model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (*top down planning*) dan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) (Sulistiyani 2004 : 37). Pada dasarnya setiap program dari Pemerintah senantiasa mencerminkan keterkaitan kedua model tersebut. Pembangunan berpusat pada manusia, maka pendekatan *bottom up planning* sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan *bottom up planning* dibutuhkan masyarakat yang lebih terbuka, inovatif, dan bersedia untuk kerja keras. Kondisi tersebut belum tercipta, bahkan dampak negatif pembangunan yang terdahulu telah mencetak masyarakat konsumtif bukan produktif, yang telah menjadi problem baru yang merugikan. Kemampuan inovasi untuk pengembangan kota dengan menghasilkan pembangunan yang produktif, relevan, dan berorientasi ke depan. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek materil, dan aspek fisik sampai kepada aspek

manajerial, untuk melakukan pembangunan tersebut berkiblat pada pemberdayaan maka aspek-aspek tersebut bisa dikembangkan menjadi aspek budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Keterkaitan masalah ini dengan pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup, tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dan lebih cepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan sebagai pembangunan bangsa.

Arah pembangunan masyarakat di kota yang paling efektif dan lebih tepat untuk mencapai tujuan adalah program yang melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang tepat dengan kebijakan pembangunan masyarakat kecil yang lebih aktif dengan memberikan kebutuhan masyarakat kota (Suparjan, 2003: 1-5). Arah pemberdayaan kota hendaknya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, sehingga akan tepat sasaran dan pembangunan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, mendidik, menjamin keseimbangan

lingkungan, memastikan keberlanjutan atau kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk menciptakan keberdayaan masyarakat yang serasi selaras dan seimbang. Angka statistik memberi informasi dan masih banyak jumlah penduduk miskin. Jumlah itu tentu saja bersifat dinamis dengan melihat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, misalnya Kota Yogyakarta yang dianggap Kota Pelajar jauh dari kemiskinan, namun faktanya masih banyak dijumpai keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan.

Menurut Data BPS Indonesia pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data bulan Agustus 2010, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja 113,83 juta orang. Dari jumlah 8,96 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat BPS Februari 2010 sebesar 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan Diploma sampai Sarjana (BPS Indonesia, 2010).

Menurut Data BPS D.I Yogyakarta kemiskinan pada Maret 2010 sebesar Rp 211.978 per kapita perbulan. Apabila dibandingkan dengan keadaan Maret 2008 yang sebesar Rp 194, 830 per kapita perbulan, maka garis kemiskinan selama setahun mengalami kenaikan sebesar 0,80 %, jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan. Pada Maret 2010 di Provinsi D.I

Yogyakarta terdapat 585, 8 ribu orang. Jika di bandingkan dengan keadaan Maret 2009 yang jumlahnya mencapai 616, 3 ribu orang, berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 30, 5 ribu orang dalam setahun. Tingkat kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin di seluruh penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta pada maret tahun 2009 sebesar 17, 23 %. Apabila dibandingkan dengan keadaan Maret tahun 2010 yang sebesar 18, 32% ada peningkatan sebesar 1, 09% selama setahun (BPS Yogyakarta, 2010).

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penanggulan kemiskinan melalui program pembangunan. Pembangunan hakekatnya adalah upaya mewujudkan tujuan Nasional Bangsa sebagai usaha bersama harus merata diseluruh lapisan masyarakat, dan diseluruh Tanah Air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (Petunjuk Teknis, Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), 2011).

Berdasarkan pembangunan nasional diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemegang kepentingan perlu disinergikan agar lebih terarah dan terkoordinasi (Septiarti, 2001:16-20).. Pelaksanaannya program penanggulan kemiskinan berbasis program Kewirausahaan yang dilakukan masyarakat memerlukan sinergi yang kokoh dan terarah dari pemangku kepentingan dalam bidang tersebut, yaitu: Pemerintah Daerah, Kalangan Swasta (BUMN, LSM, Asosiasi), dan Masyarakat lainnya. Bertujuan semua pihak dapat lebih terlibat

dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat luas.

Upaya Pemerintah Kota dalam melakukan pembangunan masyarakat kota saat ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin melalui program bantuan beras miskin, belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Langkah itu merupakan bentuk operasional yang ditempuh guna mewujudkan pemenuhan sebagian dari kebutuhan pokok masyarakat miskin dan sifatnya sesaat. Program Kursus Kewirausahaan Kota (KWK) merupakan gagasan yang dapat memberikan pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program KWK merupakan program yang dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan pedoman dari pemerintah dan sesuai dengan pendidikan non formal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kursus kewirausahaan kota.

Program Kursus Kewirausahaan Kota (KWK) merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di perkotaan sekaligus sebagai peningkatan keluarga sejahtera serta menekan masalah sosial dengan mengoptimalkan potensi yang ada (Kemendiknas, 2010: 1). Program KWK yang perlu memperhitungkan pola kehidupan yang sedang berlangsung di masyarakat. Kondisi ini harus disesuaikan dengan adat atau nilai yang sudah melekat di masyarakat, kondisi kehidupan

masyarakat adalah salah satu cara untuk suksesnya pengembangan masyarakat dikota yang sebagaimana yang diharapkan.

Program KWK secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat atau lembaga- lembaga berwenang dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya memberi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga dalam konteks program usaha (Kemendiknas, 2010).

Di Kota Yogyakarta sendiri tidak setiap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai program kursus kewirausahaan kota dalam mengatasi pengangguran dikalangan masyarakat kota. PKBM Wijaya Kusuma yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan dari program Pemerintah terutama dalam bidang pendidikan non formal, melalui kegiatan program KWK, yaitu berupa pelatihan kursus tata boga yang bertujuan untuk memberikan modal ketrampilan dan pengetahuan kepada keluarga menengah ke bawah.

PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta ini berada di dalam Pasar Induk Giwangan yang merupakan wilayah pinggiran Kota Yogyakarta. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah buruh pasar giwangan, pedagang, pegawai sipil, dan pegawai tidak tetap. Tingkat pendidikan dari penduduk Giwangan adalah lulusan SD dan SMP atau sederajat yang kurang mempunyai bekal ketrampilan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara garis besar daerah Mendungan, Giwangan, Umbulharjo dapat dikatakan daerah yang sudah

maju namun masih ada sebagian keluarga yang belum mampu atau miskin, untuk itu perlu adanya terobosan ketrampilan baru yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan pada keluarga miskin. Masih adanya keluarga yang masih berada pada tingkatan keluarga prasejahtera maka program KWK bagi keluarga miskin di wilayah tersebut dimaksud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memfasilitasi dengan ketrampilan yang tepat. Program KWK adalah salah satu program yang dapat membantu memberdayakan masyarakat, karena program KWK merangkul semua anggota masyarakat terutama pada masyarakat miskin yang perlu disejahterakan.

Proses pelaksanaan program KWK di PKBM Wijaya Kusuma masih dirasa kurang optimal dilihat dari faktor penghambat dalam program KWK masih adanya kekurangan dalam fasilitas. Melihat situasi pemberdayaan masyarakat yang ada di Daerah Giwangan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang bermaksud untuk melihat implementasi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari program KWK yang ada di PKBM Wijaya Kusuma di Mendungan UH VII no 572A RT 32/11 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Data BPS jumlah angka kemiskinan di Yogyakarta mengalami peningkatan 1,09%;
2. Ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dengan program yang diberikan;
3. Masih adanya warga masyarakat di daerah PKBM Wijaya Kusuma yang berada di tingkatan keluarga Prasejahtera;
4. Proses pelaksanaan program KWK di PKBM Wijaya Kusuma masih dirasa kurang optimal dilihat dari faktor penghambat dalam program KWK masih adanya kekurangan dalam fasilitas;
5. Adanya keluarga miskin yang belum mendapat program kursus kewirausahaan kota.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada hasil identifikasi masalah diatas dengan keterbatasan peneliti yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pada implementasi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat dari program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Daerah Mendungan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program KWK yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta ?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan keluarga peserta didik pada program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Implementasi program KWK mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta
2. Peningkatan kesejahteraan keluarga peserta didik program KWK di daerah PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta
3. Faktor pendukung dan penghambat program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang KWK

- b. Sebagai upaya memberi pengalaman baru agar dapat berguna bagi kemampuan diri sendiri
 - c. Memberikan suatu gambaran tentang program KWK di PKBM
- 2. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang Pendidikan Luar Sekolah khususnya pada Program KWK
 - b. Menjadi sarana pengembangan tentang program KWK
- 3. PKBM Wijaya Kusuma

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan manfaat bagi PKBM Wijaya Kusuma dalam merancang program-program Pendidikan Luar Sekolah.